

## **KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA DINASTI BANI UMAYYAH**

**Husnama Patih**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Email: husnamafatih08@gmail.com

### **Abstract**

*Since Rasulullah SAW died in 632 H, the Islamic government was made by Khulafaur Rasyidin, which was started by Abu Bakar and continued by Umar, Ustman to Ali bin Abi Talib. The appointment of the caliph over Khulafaur Rosyidin was a careless request based on deliberation to reach a consensus. Until finally after the death of Ali bin Abi Talib, the stick of the caliphate was taken over by Muawiyah bin Abu Sofyan from the Umayyads who became a turning point for the change in the government system from initial deliberation into an absolute monarchy. Muawiyah bin Abu Sofyan was a reliable politician, with his absolute monarchy system who was able to run the Umayyad government for 90 years from 41 H. / 661 AD to 132 H. / 750 AD. Because Muawiyah became caliph not from a deliberative system which was carried out during the Caliphate of Khulafaur Rosyidin period, this caused the division of the Muslims into several groups. However, we cannot deny all the progress that the Umayyad Caliphate made during its establishment in terms of politics, education, economy, and culture.*

**Kata Kunci:** *Khalifah, Bani Umayyah, Economic Policy, Economic Institutions, Islamic Economics*

### **Pendahuluan**

Perkembangan sejarah Islam tak luput dari perekonomian yang dilakukan. Sejak pra Islam sampai hadirnya Rasulullah ditengah-tengah manusia, hingga bisa dirasakan sampai saat ini. Dalam perjalanannya, terjadi peralihan kepemimpinan dari sepeninggal Rasulullah SAW dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin hingga pemimpin-pemimpin selanjutnya. Dalam setiap kepemimpinan yang dilakukan selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi berkembangnya perekonomian di masa itu, salah satunya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah.

Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai khalifah dari pertama dari Bani Umayyah membuat kebijakan yang sangat bertolak belakang dari kebiasaan yang ada. Khalifah yang pada mulanya ditunjuk melalui musyawarah mufakat, pada awal kepemimpinan Muawiyah dirubah menjadi sistem monarki absolut yang mena menunjuk anaknya yazid menjadi penerus kekhalifahannya. Hal ini membuat perpecahan dari kaum muslimin menjadi beberapa kelompok.

Meski demikian, kekhalifahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 dari tahun 41 H. / 661 M. hingga tahun 132 H. / 750 M. Dengan kurun waktu selama itu, ada sebanyak 14 orang dari Bani Umayyah yang pernah menduduki jabatan sebagai

**Copyright:** © 2023. The authors. Industrial and Syariah Economics licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License.

khalifah, selama itu pula banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap khalifah dalam hal pendidikan, ekonomi, politik dan budaya.

Sejarah Bani Umayyah mengalami banyak distorsi yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Abbas, musuh politik Bani Umayyah, dimana sejarah Islam mulai ditulis sejak masa pemerintahan mereka.

Sebagai manusia biasa, tentunya tidak lepas dari kesalahan yang mana menyebabkan gejala diberbagai bidang, terutama dalam pemerintahan Bani Umayyah. Dengan lamanya Daulah Bani Umayyah memimpin selama 91 tahun, berbagai pandangan negatif tentang kepemimpinan Utsman bin Affan, Abu Sufyan, dan Muawiyah lebih banyak terkespos disbanding jasa-jasanya. Meski demikian, para sejarawan umumnya sependapat bahwa para khalifah terbesar dari dinasti Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya.

Terlepas dari itu semua, kiranya dalam tulisan ini akan mencoba menyajikan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bani Umayyah baik dalam Pendidikan, ekonomi, politik maupun budaya. Terlebih dalam segi kebijakan untuk ekonomi yang menjadi fokus pembahasan.

## **Metodologi**

Penelitian analisis yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, kejadian, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2020, 60). Dengan menelaah dari berbagai sumber data maupun teori yang terkait kebijakan-kebijakan pada masa Bani Umayyah. Terkait sumber data yang digunakan, data sekunder yang berasal dari buku, artikel dan lain sebagainya sebagai sumber referensi utama dalam penelitian ini. Hasil dari berbagai telah dari literatur yang digunakan ini nantinya dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh khalifah pada masa Daulah Bani Umayyah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sekilas Bani Umayyah**

Setelah masa kepemimpinan khulafaur'rosyidin berakhir, beralihlah pada kepemimpinan Bani Umayyah. Nama "Bani Umayyah" berasal dari nama "Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf", yaitu salah seorang dari pemimpin Qurays di zaman Jahiliyah. Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah, yang masih memiliki ikatan famili dengan para pendahulu Nabi. Naiknya bani Umayyah ke puncak kekuasaan, dimulai oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, salah seorang keturunan bani umayyah dan salah seorang sahabat Nabi, dan ia menjadi bagian penting dalam setiap masa pemerintahan para *khulafaur-rasyidun*.

Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibn Anu Sufyan ibn Harb. Dialah tokoh pembangun yang besar. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip

pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasa dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. Muawiyah mendapat kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 41 H. Umat Islam sebagian membaian Hasan setelah ayahnya wafat. Namun Hasan menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat kepada Muawiyah sehingga tahun itu dinamakan *'amul jama'ah* yang artinya tahun persatuan.(Kamal, 2016, 1–2).

Peristiwa *'amul jama'ah* yang terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awwal 41 H/661 M, menjadi hitungan awal berdirinya Daulah Bani Umayyah. Sedangkan akhir Daulah ini ditandai dengan kekalahan khalifah Marwan bin Muhammad di Perang Zab pada bulan Jumadil Ula tahun 132 H/749 M.

Awal pendirian Daulah ini berawal dari masalah tahkim yang menyebabkan perpecahan di kalangan pengikut Ali, yang berakhir dengan kematiannya. Sepeninggal Ali itu sebenarnya masyarakat secara beramai-ramai membaian Hasan, putra Ali, menjadi khalifah. Tetapi Hasan kurang berminat untuk menjadi khalifah. Karena itu setelah Hasan berkuasa beberapa bulan, dan Mu'awiyah meminta agar jabatan khalifah diberikan kepadanya, Hasan dengan memberikan beberapa persyaratan, dengan rela jabatan itu dilimpahkan kepada Mu'awiyah. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah *amul jama'ah*, atau tahun persatuan umat islam.

Peristiwa Amul Jama'ah yang terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awwal 41 H/661 M, menjadi hitungan awal berdirinya Daulah Bani Umayyah. Sedangkan akhir Daulah ini ditandai dengan kekalahan khalifah Marwan bin Muhammad di Perang Zab pada bulan Jumadil Ula tahun 132 H/749 M.

Dengan begitu masa kepemimpinan Bani Umayyah berlangsung seama 91 tahu. Seama itu, pemerintahan dipimpin oleh 14 orang khalifah:

#### **Para Khalifah Dinasti Umayyah**

No	Nama	Masa berkuasa
1	Mu'awiyah I bin Abi Sufyan	41 -60 H/661-679 M
2	Yazid I bin Mu'awiyah	60-64 H/679-683 M
3	Mua'wiyah II bin Yazid	64 H/683 M
4	Marwan I bin Hakam	64-65 H/683-684 M
5	Abdul Malik bin Marwan	65-86 H/684-705 M
6	Al-Walid I bin Abdul Malik	86-96 H/705-714 M
7	Sulaiman bin Abdul Malik	96-99 H/714-717 M
8	Umar bin Abdul Aziz	99-101 H/717-719 M
9	Yazid II bin Abdul Malik	101-105 H/719-723 M
10	Hisyam bin Abdul Malik	105-125 H/723-742 M
11	Al-Walid II bin Yazid II	125-126 H/742-743 M

12	Yazid II bin Walid	126 H/743 M
13	Ibrahim bin Al-Walid II	126-127 H/743-744 M
14	Marwan II bin Muhammad	127-132H/744-750 M

Dari 14 khalifah sebagai disebut di atas, terdapat lima khalifah besar yaitu: Mu'awiyah bin Abi Sufyan (661-680 M), 'Abd al-Malik bin Marwan (685-705 M), al-Walid bin 'Abd al-Malik (705- 715 M) 'Umar bin 'Abd al-'Aziz (717-720 M), dan Hisyam bin 'Abd al-Malik (724-743 M) (Nasution, 1985; 56).(Jabir, 2007)

### **Sistem Pemerintahan Pada Masa Umayyah**

Peralihan dari kepemimpinan Khulafaur Rosyidin kepada Muawiyah menjadi awal kekuasaan dari Bani Umayyah, banyak hal yang kemudian berubah terutama dalam sistem pemerintahan yang diberlakukan, sistem pemerintahan Isam yang duunya bersifat demokrasi berubah menjadi monarki. Sukses kepemimpinan dilakukan secara turun temurun dimuai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid, ia menjadikan azas nepotisme sebagai dasar pengangkatan khalifah. Ia menjadikan azas nnepotisme sebagai dasar pengangkatan khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium.

Meski demikian, selama kepemimpinan Bani Umayyah terbagi menjadi empat periode sebagaimana berikut: *Pertama*, periode penguatan pembangunan. Periode ini bermula semenjak Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah dari Bani Umayyah. Di dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam, dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi mufakat kepada pemerintahan monarki absolut.(Thohir, 2004, bk. 34)

Pengalaman politik Muawiyah bin Abi Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam memerintah, mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestin, Suriah dan Mesir dari tangan Imperium romawi. Kemudian Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Khalifah Utsman menobatkannya sebagai “Amir Al-Bahr” yang memimpin penyerbuan ke kota Konstantinopel meski belum berhasil, selanjutnya kepemimpinan beralih ke Yazid bin Mu'awiyah.(Munir, 2011, bk. 119)

*Kedua*, periode fitnah. Dimana tiga kepemimpinan dari Muawiyah II bin Yazid, Marwan I bin Hakam hingga Abdul Malik bin Marwan terjadi tidak kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, terjadi fitnah dimana-mana, baik dari dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

*Ketiga*, periode keemasan. Setelah pergantian kepemimpinan dari Abdul Malik bin Marwan ke tangan Al-Walid I bin Abdul Malik pemerintahan mulai membaik,

hingga disebut sebagai masa keemasan Bani Umayyah. Periode ini berlangsung sampai masa kepemimpinan ke sepuluh, Hisyam bin Abdil Malik.

Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang di capai, jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu: (1) Wilayah kekuasaan dan Perpolitikan dan (2) Perkembangan Keilmuan. Bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada Kuba batu Masjidil al-Aqsha yang dikenal dengan Dome or The Rock (Qubah Ash-Shakhra) di Yerusalem, bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz, menaramenara yang didirikan oleh al-Walid di Suria dan Hijaz, bangunan gereja yang diperbaiki dan diubah fungsinya oleh al-Walid menjadi masjid, serta istanaistana kecil dan rumah-rumah peristirahatan pada khalifah dan anak-anaknya.

Seni rupa berupa lukisan yang terlihat pada ukiran dinding bangunan juga berkembang. Para pelukis disebut dengan mushawwirun. Sedangkan dalam lagu dan nyanyian sebenarnya telah berkembang pada masa pra islam dengan adanya lagu kemenangan, perang, keagamaan dan cinta serta terdapat beberapa alat musik berupa tabur segi empat (duff), seruling (qashabah), suling rumput (zamar). Musisi terkenal pada masa ini salah satunya adalah Said ibn Misjah, Ibn Surayjsab Ibn Muhriz.(Hitti, 2005, bk. 343)

*Keempat*, periode kemunduran. Setelah berkuasa selama 91 tahun, akhirnya Dinasti Bani Umayyah berakhir dengan Berikut ini adalah beberapa faktor yang dominan dalam fase kemunduran atau kehancuran dinasti Bani Umayyah, yaitu: Munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok muslim non-Arab (mawali); Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah, ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah; Ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabiah Utara (Bani Qais) dengan suku Arabiyah Selatan (Bani Kalb), yang sudah ada sejak sebelum Islam; Sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalfahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat; Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir daerah Bani Suweif sebagai akhir dari Dinasti Bani Umayyah di Damaskus; Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalfahan.(Nasution, 2001, bks. 59–62)

### **Kebijakan Politik Bani Umayyah**

Selama kepemimpinan Bani Umayyah, tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan demi keberlangsungan negara termasuk kebijakan dalam kegiatan

ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tentunya bukan tanpa alasan, baik kebijakan yang melanjutkan dari kebijakan oleh kholifah sebelumnya maupun kebijakan-kebijakan baru yang diambil.

Diakhir masa kepemimpinan kholifah Ali bin Abi Tholib, terjadi konflik politik yang menyebabkan beberapa gejolak di berbagai tempat. Konflik-konflik itulah yang menyebabkan melemahnya kepemimpinan Ali yang juga berimbas kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

Menjabatnya Bani Umayyah menduduki puncak pemerintahan memunculkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut:

1. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus (Syiria)

Keputusan ini di dasarkan atas pertimbangan politis dan alasan keamanan. Karena letaknya jauh dari Kufah pusat kaum Syi'ah pendukung Ali dan jauh dari Hijaz tempat tinggal mayoritas Bani Hasyim dan Bani Umayyah, maka dapat terhindar dari konflik yang lebih tajam antara dua bani itu dalam memperoleh kekuasaan. (Farah, 2014, p. 29) Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang timbul dari reaksi pembentukan kekuasaannya, khususnya dari kelompok yang tidak menyukainya. Langkah awal yang diambilnya adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus.

2. Merubah sistem pemerintahan menjadi Monarki Absolut

3. Mu'awiyah membari penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan mencapai puncak kekuasaan

4. Menumpas orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya

5. Penguatan Militer dan Kebijakan Ekspansi

Pada masa Bani Umayyah organisasi militer terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Penguatan militer yang dilakukan oleh para kholifah Bani Umayyah itu tidak lain dikarenakan kebijakan ekspansi, yaitu kebijakan perluasan wilayah kerajaan.

6. Penataan Administrasi Negara

Saat Muawiyah menjabat kekhalifahan diantara langkah strategis yang dilakukan adalah peningkatan pengelolaan administrasi negara (Fu'adi, 2011, bk. 82). Apa yang dilakukan Muawiyah tersebut kemudian terus disempurnakan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Hal-hal ini meliputi:

a. Merancang Pola Pengiriman Surat (POS).

Muawiyah yang mengawali kebijakan ini kemudian dimatangkan lagi pada masa Malik bin Marwan. Proyek al-Barid (pos) ini, semakin ditata dengan baik, sehingga menjadi alat pengiriman yang baik pada masa itu. Dengan adanya pelayanan pos ini, otomatis adanya kebutuhan biaya untuk menggaji pegawai pelayanan pos, sehingga pendapatan pemerintahan harus lebih meningkat untuk menutupi biaya dan tunjangan pegawai tersebut.

b. Meresmikan Lambang Kerajaan

c. Membentuk Lembaga Pemerintahan, yaitu:

1) *An-Nizam al-Siyasi* : lembaga politik

- 2) *An-Nizam al-Mali* : lembaga keuangan
  - 3) *An-Nizam al-Idari* : lembaga tata usaha negara
  - 4) *An-Nizam al-Qada'i* : lembaga kehakiman
  - 5) *An-Nizam al-Harbi* : lembaga ketentaraan
  - 6) *Diwan al-Kitabah* : lembaga sekretaris negara
- d. Pada tingkat pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan departemen, al-katib, al-hajib, dan diwan (Farah, 2014, p. 34). Dewan Sekretaris Negara (*Diwan al-Kitabah*) untuk untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan, meliputi:
- 1) *Katib al-Rasail* : sekretaris administrasi
  - 2) *Katib al-Kharraj* : sekretaris keuangan
  - 3) *Katib al-Jundi* : sekretaris tantara
  - 4) *Katib as-Syurthah* : sekretaris kepolisian
  - 5) *Katib al-Qadhi* : sekretaris kehakiman
- e. Pendirian Biro Negara
- Pendirian Biro Negara sebenarnya sudah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa dinasti ini lebih terperinci dan dimaksimalkan fungsinya. Bentuknya berupa Biro Korespodensi dan Biro Segel.
- f. Reformasi Moneter
- Pada Khalifah Abdul Malik telah menempatkan dinar, emas dan dirham perak Arab sebagai bagian dari proses Arabisasi administrasi Negara. Dari kebijakan moneter masa itu menimbulkan konsekuensi politik dan ekonomi, seperti:
- 1) Penguatan kedaulatan Negara yang tersermin dari mata uang yang independen
  - 2) Pengumpulan pajak pada unit moneter terpadu bukan mata uang Persia di Persia dan Romawi di Syiria dan Mesir
  - 3) Penekanan yang lebih pada kebutuhan akan penukaran uang
  - 4) Munculnya bentuk operasional perbankan
  - 5) Penyebaran instrument keuangann seperti ruq'a (perintah pembayaran) dan sakk (penarikan uang)
- g. Urbanisasi dan Kegiatan Ekonomi
- Dengan adanya ibukota provinsi disetiap daerah kekuasaan, hal ini mengakibatkan urbanisasi masyarakat dari desa menuju kota meupun membentuk kota baru yang secara langsung maupun tidak langsung akan menggerakkan roda perekonomian masa itu.

### **Pranata Ekonomi pada Masa Dinasti Umayyah**

Perekonomian adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara. Sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan.(Huda, 2020, p. 95). Pranata ekonomi merupakan interaksi tatanan ekonomi yang timbul pada masa Dinasti Umayyah. Pertama dalam sektor ekonomi mikro antara lain:

## 1. Pertanian

Pada masa Dinasti Umayyah, atau bahkan sejak sebelumnya pertanian memegang peranan penting dalam tatanan ekonomi. Pada masa ini, pertanian semakin dikembangkan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang mati untuk dihidupkan lagi, dengan cara membangun kanal-kanal dari sungai di Irak untuk mengalir ke lahan-lahan tersebut. Hal itu merupakan contoh kebijakan gubernur Irak Al-Hajj dalam mengembangkan sektor pertanian di Irak. Ada juga di Mesir yang memindahkan keluarga untuk mengembangkan pertanian di wilayah Balbees, Mesir Hilir.

Pada masa ini, karena pentingnya pranata ekonomi bidang ini maka banyak dikembangkan penelitian dan pelatihan khusus pertanian, serta pembangunan irigasi yang terus digalakkan.

## 2. Peternakan

Kemajuan pranata peternakan juga mengalami kemajuan yang pesat, terutama di daerah padang rumput seperti Arab bagian tengah yang banyak ditumbuhi rumput untuk pakan ternak.

Hewan yang mendominasi komoditi pada Dinasti Umayyah yang ditanamkan seperti kambing, domba, dan sapi. Unta juga banyak dikembangkan namun tidak seperti kambing dan domba kemajuannya, karena hewan ini mudah ditanamkan serta hasilnya tidak hanya daging melainkan kulit dan bulunya.

## 3. Perdagangan

Perdagangan juga memegang peranan penting pada masa dinasti ini. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kemajuan di pranata ini, seperti:

- a. Perluasan wilayah kekuasaan Islam yang luas semakin memperbanyak konsumen dan pedagang
- b. Jalur-jalur perdagangan lebih terjamin keamanannya
- c. Semakin banyak dibangun kota-kota baru sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial masyarakat
- d. Keragaman produk pertanian dan manufaktur yang melahirkan berbagai jenis komoditas yang lain

## 4. Hukum Bisnis

Hukum bisnis ini akibat dari semakin maraknya perdagangan, sehingga berkembanglah hukum yang berkaitan dengan kontrak bisnis. Contohnya, Mudharabah, Musyarakah, dan Hiwalah.

Kedua dalam sektor ekonomi makro (Keuangan Negara). Pada Dinasti Umayyah pendapatan Negara dipilah menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal atau pendapatan Negara dari pajak dan kebijakan moneter atau pendapatan Negara bukan pajak.

### 1. Kebijakan Fiskal atau Pendapatan Pajak

- a. Seperlima *Ghanimah* atau *Khums*

Aturan khums atas ghanimah telah diatur dalam al-Quran sebagai pendapatan diletakkan dibawah keputusan penuh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara serta cara menghabiskannya.

b. Zakat

Zakat merupakan sumber pendapatan yang sangat besar amsa dinasti ini. Seiring dengan semakin makmur dan sejahtera besarnya juga semakin meningkat.

c. Jizyah

*Jizyah* berupa zakat yang dikenakan pada non-muslim, namun tidak dikenakan pada perempuan dan anak-anak. Seirung berjalannya waktu *jizyah* mengalami penurunan karena semakin banyak yang masuk muslim yang ditengarai hanya menghindari *jizyah*, sehingga diberlakukan *jizyah* pada orang yang baru masuk Islam. Namun, kebijakan ini dihapus lagi pada mas Umar bin Abdul azis.

d. Kharaj

*Kharaj* merupakan pajak yang dikenakan terhadap lahan pertanian yang tersisa ditangan penjaga non-muslim atas penaklukan Islam. Perbedaan dengan tanah *Sawafi* dengan *Kharaj* adalah, kharaj merupakan tanah yang tersisa di tangan pemilik non-muslim aslinya ada saat penaklukan Islam untuk pembayaran *Kharaj*. Sedangkan *Sawafi* adalah tanah yang asli pemilik non-muslim yang telah itinggalkannya tanpa ahli waris pada saat penaklukan dan sebagai hasilnya tanah itu diletakkan dibawah administrasi Negara.

e. *Usyur*

*Usyur* adalah bea masuk yang dikenakan terhadap Negara-negara asing kepada pedagang Muslim, namun telah diperpanjang dan diterapkan untuk semua barang yang melintasi perbatasan dengan Muslim dan non-muslim. Pada dinasti ini melebar ke pajak baru seperti pajak pasar, bea materei pada penjualan rumah pada penjual, pajak warisan dan pajak perikanan.

2. Kebijakan Moneter atau Pendapatan bukan pajak

a. *Fai'*

*Fai'* adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh Ketika musuh menyerah tanpa pertempuran militer yang sebenarnya. Semua rampasan akan masuk ke Negara tanpa ada yang dibagikan ke prajurit. Namun jika menyerahnya setelah perjanjian atau kekalahan maka Negara hanya berhak seperlima dari harta rampasan.

b. *Tanah Sawafi*

Tanah *Sawafi* merujuk pada tanah kepemilikan yang dipindahkan kepada Negara karena beberapa alasan:

- 1) Pemilik asli tanah kosong setelah penaklukan Islam
- 2) Kematian pemilik tanah non-muslim dalam perang melawan Islam tanpa meninggalkan ahli waris

3) Kematian pemilik tanah Muslim atau non-Muslim tanpa meninggalkan ahli waris

c. *Pendapatan Sektor Bisnis Publik*

Pada dinasti ini penguasa telah meskipun skalanya masih relative kecil, seperti penggilingan, toko-toko dan sewa tanah untuk toko. Pendapatan ini semakin meningkat disaat pemerintahan al-Walid ibnu Abd al-Malik, dimana dibentuk biro khusus, *diwan al-mustaghallat* yang bertugas untuk menjalankan dan mengawasi kegiatan sector bisnis pemerintah ini.

### **Ringkasan Peranan Kebijakan Khalifah-Khalifah Bani Umayyah bagi Kemajuan Ekonomi**

Muawiyah sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah yang juga telah mengubah sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi menjadi pemerintahan yang bersifat monarki absolut. Dinasti Umayyah berkuasa lebih kurang 91 tahun (661 M / 14 H sampai 750 M / 132 H), selama kurun waktu itu, terdapat 14 orang khalifah yang pernah memimpin dengan kebijakan-kebijakannya, (Rachman, 2018, 89) yaitu:

1. Muawiyah bin Abu Sofyan (41-60 H/661-679 M)
  - a. Mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarkhiheriditis (kerajaan turun temurun), sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebut yakni dengan mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota.
  - b. Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus
  - c. Menarik pasukan pengepung Konstantinopel
  - d. Mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi
  - e. Oleh para sejarawan, beliau di sebut sebagai orang Islam pertama yang membangun kantor catatan Negara dan layanan pos (Al-Barid)
  - f. Membangun pasukan Suriah menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi.
  - g. Mencetak mata uang, mengembangkan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik.
  - h. Mengembangkan jabatan qadi (hakim) sebagai jabatan professional.
  - i. Menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara.
2. Yazid bin Muawiyah (60-64 H/ 679-683 M)

Pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut menyebabkan peperangan di Karbala, serta pemberontakan di Makkah dan Madinah dengan keras. Dengan berbagai bentuk penolakan dan pemberontakan oleh masyarakat membuat pemerintah sangat sibuk, sehingga pada masa pemerintahan Khalifah Yazid tidak banyak perkembangan.
3. Muawiyah bin Yazid (64 H/ 683 M)

Muawiyah menggantikan ayahnya Yazid menjadi Khalifah selanjutnya. Dengan adanya tekanan jiwa yang berat membuat Muawiyah tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhilafahan, ujungnya Khalifah Muawiyah hanya menjabat selama beberapa bulan saja.

4. Marwan bin Hakam (64-65 H/ 683-684 M)

Muawiyah II tidak menunjuk penggantinya sebagai khalifah kemudian keluarga besar Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah, sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya dulu sebagai seorang pemegang stempel khalifah sewaktu pemerintahan Utsman bin Affan, selama menjadi Gubernur pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan ketika menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus.

5. Abdul Malik bin Marwan. (65-86 H/ 684- 705 M)

Ia merupakan orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah sehingga ia disebut-sebut sebagai “pendiri kedua” bagi kedaulatan Umayyah. Beberapa kebijakan yang diambil adalah:

- a. Pengembangan pemikiran terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam, sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 74 H/659 H beliau mencetak mata uang Islam tersendiri yang di dalamnya mencantumkan kalimat *bismillahirrahmanirrahim* dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lain.
- b. Pada tahun 693 khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak uang sendiri di damaskus. Sementara itu Hajjaj pada tahun berikutnya melakukan hal yang sama. Akibatnya masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Siria, dan Iraq. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik tersebut, sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti itu. Sebab kita melihat, sebelum diberlakukannya kebijakan ini mata uang yang beredar sebagai alat tukar adalah mata uang Roma dan mata uang Persia yaitu dirham (drachma) dan dinar (dinarius). Dengan tidak adanya mata uang sendiri tentu akan dapat mengurangi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat Islam di daerah yang demikian luasnya. (Huda, 2020, p. 96)
- c. Menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang mencetak mata uang di luar percetakan Negara.
- d. Melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam.

6. Al-Walid bin Abdul Malik (86-96 H/ 705- 714 M)

Pada masa Khalifah Al-Walid kekuasaan Islam melangkah ke Spanyol dibawah kepemimpinan Thariq bin Yazid. Banyak pembangunan yang dilakukan pada pemerintahan Khalifah Al-Walid di daerah-daerah perluasan kekuasaan Islam.

Ia juga melakukan penyantunan kepada para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Ia membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus.

7. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H/714-717 M)

Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memimpin, ia sangat mencintai kehidupan dunia dan kegemarannya bersenang-senang, tabiatnya tersebut membuat ia dibenci oleh rakyatnya. Sulaiman wafat di Dabik di perbatasan Bizantium setelah berkuasa selama 2 tahun.

8. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H)/ 717-719 M)

Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. berbagai pembenahan dilakukannya di seluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Langkah ini dimulai dari dirinya sendiri. (Huda, 2020, p. 98)

- a. Saat diangkat beliau. mengumpulkan rakyat dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya yang di peroleh secara tidak wajar kepada Baitul Mal, seperti: tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang di Yamamah, Mukaedes, Jabal Al Wars, Yaman dan Fadak hingga cincin berlian Al-Walid
- b. Selama berkuasa beliau juga tidak mengambil sesuatu dari Baitul Mal, termasuk pendapatan Fai yang telah menjadi haknya
- c. Memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Bilau juga menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain.
- d. Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bersifat melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan
- e. Menghapus pajak terhadap kaum muslimin, mengurangi beban pajak kaum nasrani, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa.
- f. Memperbaiki tanah pertanian, menggali sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan musafir dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. (Afzalur Rahman, 1995)

9. Yazid bin Abdul Malik (101-105 H/ 719-723 M)

Pada masa kekuasaannya bangkit kembali konflik antara Mudharyyah dengan Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid kurang adil dalam memimpin.

10. Hisyam bin Abdul Malik (105- 125 H/ 723-742 M)

Hiyam bin Abdul Malik naik tahta seteah kematian saudaranya Yazid. Pada masa kepemimpinannya terjadi perselisihan antara bani Umayyah dengan bani Hasyim. Pemerintahannya berjalan lunak dan jujur, banyak jasanya dalam

pemulihan keamanan dan kemakmuran, akan tetapi semua kebijakannya tersebut tidak dapat membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Inilah yang semakin memperlicin kemerosotan dinasti Umayyah.

11. Al-Walid bin Yazid (125-126 H/ 742- 743M)

Walid oleh para penulis Arab dilukiskan sebagai orang yang tidak bermoral, pemabuk, dan pelanggar. Pada awal mualanya ia menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada fakir miskin dan orang-orang lemah. Namun semua itu digugurkan dengan sifatnya yang pendendam, serta jahat kepada sanak saudaranya. Sikapnya ini semakin mempertajam kemerosotan bani Umayyah.

12. Yazid bin Walid bin Abdul Malik (126 H/743 M)

13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik(126- 127 H/ 743- 744 M)

14. Marwan bin Muhammad (127-132 H/ 744-750 M)

### **Sumbangan Uma dan Fuqoha daam Pemikiran Ekonomi Masa Bani Umayyah**

Selain dari khalifah yang menjabat, pada masa Bani Umayyah juga dijumpai banyak pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari kalangan ulama dan fuqoha, diantaranya:

1. Zaid bin Ali

Beliau adalah cucu dari Imam Husein yang juga merupakan ahli fikih terkenal di Madinah. Pemikiran dari Zaid bin Ali seperti yang dikemukakan Abu Zahra adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.(Muflihini, 2020a, p. 65)

2. Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah murid dari Zaid ibn Ali. Beliau adalah seorang fuqoha yang juga pedagang. Aktivitas berdagang beliau dilakukan di kota Kufah yang saat itu adalah pusat perdagangan dan perekonomian yang sedang berkembang pesat. Dengan aktivitas berdagang yang beliau lakukan dan melihat kondisi pasar, beliau menaruh perhatian besar pada jual beli dengan akad Salam.(Muflihini, 2020b, p. 66)

Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H, pada masa pemerintahan Abdullah bin Marwan. Beliau dikenal sebagai seorang fuqoha dengan metode istimbath nya yang terkenal “istihsan” beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang dipusat perdagangan dan perekonomian Kuffah.

3. Al-Awza'i

Abdul Rahman al-Awza'i berasal dari Beirut yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau juga pendiri hukum walaupun tidak bertahan lama. Abdur Rahman Al-Awza'i menghasilkan pemikiran diperbolehkannya kebebasan daam kontrak dan memfasilitasi orang-orang daam transaksi mereka. Beliau adalah penggagas orisinalitas ilmu ekonomi Syariah.(Muflihini, 2020a, p. 66)

4. Imam Malik bin Anas

Imam Maik lebih dikenal sebagai ahli fiqh ketimbang ahli ekonomi, hal ini terlihat dari konsepnya yang populer “masalah mursalah” Beliau juga menerbitkan kitab “al-muwattho”.

## **Kemunduran Dinasti Bani Umayyah**

Diantara sebab-sebab yang mengakibatkan Dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran dan membawa kepada kehancuran (Jabir, 2007), adalah sebagai berikut:

1. Munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas atas pemerintahan yang dipimpin oleh Bani Umayyah.
2. Ketidakadanya ketentuan yang jeas dan tegas terhadap sistem untuk pergantian khalifah, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dikalangan anggota keuarha khalifah.
3. Bani Umayyah tidak mampu menggalang persatuan dan kesatuan antara suku Arabiyah Utara (Bani Qais) dengan suku Arabiyah Selatan (Bani Kalb).
4. Para Khaifah Bani Umayyah sangat kurang perhatian terhadap perkembangan agama, sehingga banyak dari pemuka agama yang merasa kecewa.
5. Sikap yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memiku beban kenegaraan yang berat.
6. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir daerah Bani Suweif

## **Kesimpulan**

Bani Umayah merupakan keturunan Umayah, yang masih memiliki ikatan famili dengan para pendahulu Nabi. Naiknya bani Umayah ke puncak kekuasaan, dimulai oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, salah seorang keturunan bani umayah dan salah seorang sahabat Nabi, dan ia menjadi bagian penting dalam setiap masa pemerintahan para *khulafaur-rasyidun*.

Muawiyah bin Abu Sofyan menjadi khalifah merubah sistem pemilihan khalifah yang awalnya dengan musyawarah mufakat menjadi monarki absolut dan kemudian mengangkat Yazid bin Muawyah menjadi khalifah sebagai penerusnya. Sistem ini berlangsung selama 91 dari tahun 41 H. / 661 M. hingga tahun 132 H. / 750 M. selama itu pula sebanyak 14 orang menjadi khalifah dari Bani Umayyah.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bani Umayyah selama menduduki puncak pemerintahan dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut: Pindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus (Syiria), merubah sistem pemerintahan menjadi Monarki Absolut, menguatkan Militer dan Kebijakan Ekspansi, Penataan Administrasi Negara (merancang Pola Pengiriman Surat (POS), meresmikan Lambang Kerajaan, membentuk Lembaga Pemerintahan, membentuk semacam Dewan Sekretaris Negara (*Diwan al-Kitabah*) untuk untuk mengurus berbagai urusan pemerintaha, pendirian Biro Negara, reformasi Moneter, Urbanisasi dan Kegiatan Ekonomi)

Selain itu, dalam pranata ekonomi pada masa Dinasti Umayyah berkembang seperti dibawah ini: Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Hukum Bisnis, Keuangan Negara, Pendapatan bukan pajak, Pendapatan Pajak

Masa keemasan Bani Umayyah ialah dengan banyak sekali keberhasilan yang di capai, dengan yang paling utama dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu: (1) Wilayah kekuasaan dan Perpolitikan dan (2) Perkembangan Keilmuan. Bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada Kuba batu Masjidil al-Aqsha yang dikenal dengan Dome or The Rock (Qubah Ash-Shakhra) di Yerusalem, bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz, menaramenara yang didirikan oleh al-Walid di Suria dan Hijaz, bangunan gereja yang diperbaiki dan diubah fungsinya oleh al-Walid menjadi masjid, serta istanaistana kecil dan rumah-rumah peristirahatan pada khalifah dan anak-anaknya.

Setelah lama memimpin, Bani Umayyah mengalami kemunduran yang disebabkan oleh: munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas atas pemerintahan yang dipimpin oleh Bani Umayyah, ketidakadanya ketentuan yang jeas dan tegas terhadap sistem untuk pergantian khalifah, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dikalangan anggota keuarha khalifah, Bani Umayyah tidak mampu menggalang persatuan dan kesatuan antara suku Arabiyah Utara (Bani Qais) dengan suku Arabiyah Selatan (Bani Kalb), para Khaifah Bani Umayyah sangat kurang perhatian terhadap perkembangan agama, sehingga banyak dari pemuka agama yang merasa kecewa, sikap yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memiku beban kenegaraan yang berat, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir daerah Bani Suweif.

### **Daftar Pustaka**

- Afzalur Rahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam* (1st ed.). PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Farah, N. (2014). Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(2), 80–94.
- Fu'adi, I. (2011). *Sejarah Peradaban Islam* (1st ed.). Teras.
- Hitti, P. K. (2005). *History of The Arabs edisi Terjemah* (1st ed.). PT Serambi Ilmu Semeste.
- Huda, M. N. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah*. 1(01), 94–105.
- Jabir, Muh. (2007). Umayyad Dynasty in Syria (Formation, Progress and Downfall). *Hunafa*, 4(3), 271–280.
- Kamal, A. H. (2016). Sejarah Kebijakan Ekonomi Politik Dinasti Umayyah. *Rasail*, 3(1), 1–12.

- Muflihin, M. D. (2020a). Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter Dan Fiskal. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. <https://doi.org/10.31538/ijse.v3i1.462>
- Muflihin, M. D. (2020b). Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter Dan Fiskal. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 58–69. <https://doi.org/10.31538/ijse.v3i1.462>
- Munir, S. (2011). *Sejarah Peradaban Islam Klasik*. Alfabeta.
- Nasution, H. (2001). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Universitas Indonesia.
- Rachman, T. (2018). Bani Umayyah di Lihat dari Tiga Fase. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 86. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1079>
- Sukmadinata, N. S. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Rosdakarya.
- Thohir, A. (2004). *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia ISLAM* (Rahmatika, Ed.). PT. RajaGrafindo Persada.